

Siaran Pers
Manado, 7 Februari 2024

CATAHU 2023 “Tumbal Oligarki: Nestapa Orang-Orang Pinggiran Demi Investasi Pariwisata”

Sepanjang tahun 2023, LBH Manado menerima sebanyak 85 pengaduan dan melakukan pendampingan terhadap 20 kasus, 14 litigasi dan 6 non-litigasi. Dari jumlah pengadu, 25 diantaranya adalah perempuan, 58 adalah laki-laki dan 2 kelompok. Sedangkan jumlah total penerima manfaat baik individu, kelompok warga dan komunitas sebanyak 691 orang. Dari semua kasus, LBH Manado menemukan jumlah kasus terbanyak adalah kriminalisasi yakni sebanyak 11 kasus. Kriminalisasi terjadi pada kasus-kasus perampasan lahan akibat pembangunan industri pariwisata dimana nelayan dan petani di Likupang dan Kalasey Dua menjadi korbannya.

Data Kasus Umum

LBH Manado menyusun data kasus melalui pendokumentasian kasus yang dihimpun sejak bulan November 2022 sampai Oktober 2023.

Tabel 1.
Jumlah Kasus sepanjang tahun 2023

Kasus	Jumlah
Kriminalisasi	11
Perburuhan	4
Kekerasan Berbasis Gender	4
Peradilan yang Adil	3
Perkotaan dan Miskin Kota	2
Pelayanan Publik	1
Konflik Agraria	1
Lingkungan Hidup	1
Kekerasan Aparat	1

Tabel 2.
Pelanggaran hak terbanyak pada tahun 2023

Jenis Hak	Jumlah
Hak perlindungan terhadap pembela HAM	9

Hak atas keamanan dan integritas pribadi	5
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan tentang PHK	4
Hak atas kepemilikan	3
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparial	2
Hak untuk bebas dari penyiksaan	2
Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan	2

Tabel 3.
Pelaku terbanyak pada tahun 2023

Kategori	Jumlah
Kepolisian	15
Korporasi	8
Pemerintah lokal	5
Individu/kelompok kuasa dalam komunitas	4
Individu/kelompok kuasa dalam keluarga	1
Individu/kelompok kuasa dalam sekolah	1
Pemerintah pusat	1

Catatan Terhadap Demokrasi

Sebanyak 14 pembela lingkungan yang ada di Likupang dan Kalasey Dua mengalami kriminalisasi dalam bentuk *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP). Di Likupang, sebanyak 8 orang nelayan dikriminalisasi karena melakukan penolakan terhadap pengembangan KEK Pariwisata Likupang oleh PT. MPRD. Pasalnya, masyarakat Pulisan dan Kinunang telah menguasai dan memanfaatkan lahan di wilayah pesisir Likupang selama secara turun temurun. Mereka dikriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik dan pengrusakan.

Sementara di Kalasey Dua, sebanyak 6 perempuan mendapatkan panggilan polisi pada Desember 2022 dengan tuduhan perlindungan anak. Mereka dituduh melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa menolak perampasan lahan di Kalasey Dua pada November 2022. Padahal, anak-anak yang terlibat dalam unjuk rasa juga memiliki hak untuk mempertahankan haknya.

Tabel 4.
Data Kriminalisasi pada tahun 2023

Korban	Jumlah	Bentuk Kriminalisasi	Peristiwa terkait	Kebijakan yang melatari
Nelayan Kinunang	1 orang	Laporan Pidana Pencemaran Nama Baik	Unjuk rasa masyarakat Pulisan dan Kinunang menolak KEK Likupang di Kantor DPRD Sulut	Pengembangan KEK Likupang untuk Industri Pariwisata
Nelayan Pulisan	7 orang	Laporan Pidana Pengrusakan	Pencabutan papan plang menolak klaim sepihak PT. MPRD atas Pantai Pulisan	Pengembangan KEK Likupang untuk Industri Pariwisata
Petani Kalasey Dua	6 orang	Laporan Pidana Perlindungan Anak	Unjuk rasa petani menolak perampasan lahan perkebunan oleh Pemprov Sulut	Pembangunan Politeknik Pariwisata untuk mendukung Industri Pariwisata

LBH Manado menemukan bahwa meningkatnya tren pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara berbanding lurus dengan penurunan kualitas demokrasi. Agenda hak asasi manusia sama sekali hilang dari pembangunan yang sejak awal memang bertujuan semata-mata untuk peningkatan ekonomi, akumulasi modal, dan privatisasi sumber daya alam yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan pemiskinan struktural. Nelayan, petani, perempuan, anak-anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya rentan menjadi korbannya.

Selain kehilangan kuasa atas sumber daya, masyarakat terdampak di Likupang dan Kalasey Dua juga tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pembungkaman menjadi modus negara dan swasta untuk meredam upaya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara tidak berbasis hak asasi manusia dan merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Catatan terhadap Hak Asasi Manusia

1. Kuatnya orientasi ekonomi pada pembangunan yang tidak berperspektif hak asasi manusia. Pada konflik agraria, lingkungan hidup dan perkotaan sepanjang 2023 menyumbang jumlah korban terbanyak yaitu hampir 600 orang. Korbannya merupakan petani, nelayan, masyarakat kota dan pedesaan yang mengalami perampasan lahan pesisir di Likupang, pengusuran perumahan di Singkil Dua, serta perampasan lahan yang dimanfaatkan sebagai fasilitas publik di Sonder. Motif terjadinya konflik adalah pembangunan infrastruktur dengan pelaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, dan korporat;

2. Lemahnya perspektif korban pada penegak hukum serta kurangnya kapasitas aparat kepolisian terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender khususnya dengan korban anak. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Talaud yang diadukan ke LBH Manado pada Februari 2023 mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas. Penyidik gagal melakukan penahanan terhadap 3 orang pelaku dan bahkan menanggukkan penahanan terhadap pelaku yang mengakibatkan pelaku melarikan diri. Penyidik juga gagal mempertimbangkan *visum psikiatrikum* atau pemeriksaan psikologis yang diajukan pendamping hukum korban sebagai alat bukti yang sah;
3. LBH Manado kembali mendapati proses peradilan yang mengabaikan hak tersangka. Pada Agustus 2023, aparat kepolisian menembak kedua kaki RT, seorang tersangka yang sempat ditahan di Polsek Wanea. Akibatnya, korban mengalami luka pada kedua kakinya yang mengakibatkan dia sulit berjalan dan menderita gangguan kesehatan. Baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan negeri gagal memberikan layanan kesehatan bagi tersangka serta gagal memastikan adanya akuntabilitas pada tindakan kekerasan oleh aparat selama tahap penyidikan.

Pada tahun 2023 ini, LBH Manado mendapati bahwa hak rakyat seakan-akan menjadi tumbal pembangunan, mereka menderita nestapa dari industri pariwisata yang dibekingi oligarki. Oleh karena itu, kami memberikan tema pada CATAHU 2023 yaitu **“Tumbal oligarki: Nestapa Orang-Orang Pinggiran Demi Investasi Pariwisata”** untuk menggambarkan kompleksitas persoalan yang dimaksud.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka kami, LBH Manado meminta kepada Negara untuk:

Umum

1. Menghentikan pembangunan yang merampas hak-hak rakyat atas kekayaan alam yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman partisipasi publik dan pemiskinan struktural terhadap nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya;
2. Menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia bagi semua orang serta mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal dan rentan.

Khusus

1. Mengimplementasikan kebijakan Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi terhadap pembela HAM dan memberikan perlindungan terhadap pembela HAM yang menjadi korban kriminalisasi;
2. Menyelenggarakan reforma agraria sejati dan mengambil upaya pemulihan hak-hak korban perampasan lahan khususnya pada masyarakat yang ada di Likupang, Singkil Dua, Kalasey Dua dan Sonder;
3. Mendorong implementasi UU TPKS secara penuh di tingkat kepolisian serta memperkuat kapasitas dan perspektif gender pada aparat penegak hukum untuk memastikan adanya penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang berperspektif korban;

4. Memastikan adanya peradilan yang adil dan adanya akuntabilitas terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Masyarakat Sipil

1. Menentukan positioning gerakan kerakyatan yang berjangkar dari akar rumput, membangun solidaritas, gerakan bersama dan pendidikan-pendidikan alternatif untuk menciptakan kesadaran kritis.

Narahubung:

Satryano Pangkey (085329101989) satryano.lbhmanado@ylbhi.or.id

Citra Tangkudung (082349447800) citra.lbhmanado@ylbhi.or.id

David Wungkana (085399712567) david.lbhmanado@ylbhi.or.id

Jl. Arnold Mononutu, No. 29, Wanea, Manado